

ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGENDALIAN INTERNAL DAN KETAATAN ATURAN AKUNTANSI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (*FRAUD*)

Ayu Yuniar¹, Djoko Kristanto²
ayuynr.tkr3@gmail.com¹
Universitas Slamet Riyadi Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan keuangan, pengendalian internal, dan ketaatan aturan akuntansi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini merupakan studi kasus pada Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden yang melibatkan perangkat desa pada Desa di Kecamatan Banyudono. Hasil dari uji t pengelolaan keuangan memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil uji t pengendalian internal tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Hasil uji t ketaatan aturan akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Pencegahan Kecurangan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of financial management, internal control, and compliance with accounting rules on the prevention for fraud in managing village fund allocations. This study is a case study in a village in Banyudono District, Boyolali Regency. The type of data used is quantitative data, the data source in this study uses primary data. Data collection methods used include interviews, questionnaires and documentation. The data analysis technique used is multiple linear analysis with a sample of 75 respondents involving village officials in a village in Banyudono District. The results of the financial management t-test have an effect on the prevention for fraud. The results of the internal control test have no effect on the prevention for fraud. The results of the accounting rule compliance test have no effect on the prevention for fraud.

Keywords: Financial Management, Internal Control, Accounting Rule Compliance, Prevention For Fraud.

PENDAHULUAN

Dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan. Sumber dan mekanisme penyaluran dana desa yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (2014) dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung (Jumlah Penduduk, Angka Kemiskinan, Luas Wilayah dan Tingkat Kesulitan Geografi Desa). APBD memiliki peran penting dalam kesuksesan pembangunan daerah. APBD merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban dan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan proses pengelolaan keuangan desa. Pada relasinya masyarakat sering mengeluhkan proses alokasi skala prioritas kebutuhan dan hanya sedikit merepresentasikan segi efektivitas, efisiensi dan ekonomi (Hehanussa, 2015).

Berbagai tantangan muncul dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan dalam suatu instansi, salah satunya yaitu praktik yang mengarah pada tindakan kecurangan (*fraud*). Kecurangan yang dilakukan berpotensi pada kerugian suatu instansi. Kecurangan yang dilakukan dapat berupa korupsi (*corruption*), penyalahgunaan atau pencurian aset (*asset misappropriation*), dan kecurangan laporan (*fraudulent statement*) (ACFE INDONESIA CHAPTER, 2016). Kecurangan merupakan suatu tindakan berupa penipuan atau kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang atau badan secara sengaja yang mengakibatkan timbulnya manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas serta pihak lain. Potensi kecurangan sering kali terjadi pada berbagai instansi dengan adanya beberapa potensi seperti keterlambatan pelaporan serta tidak dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan yang telah di buat.

Indonesian Corruption Watch (IWC, 2019) telah mengawasi tindakan korupsi yang terjadi di desa. Hasil pemantauan IWC, pada tahun 2015-2019 kasus tindak pidana korupsi di desa semakin meningkat. Kasus korupsi mencapai 27 kasus pada tahun 2015 dan melonjak menjadi 53 kasus pada tahun 2016. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi di tahun 2019 dengan jumlah kasus 191 kasus. Sehingga seluruh kasus korupsi yang teridentifikasi berjumlah 271 kasus. Dari 271 kasus korupsi tersebut, tidak semuanya adalah korupsi yang melibatkan APBD. Jumlah kasus korupsi objek APBD berjumlah 141 kasus, sementara berturut-turut 30 kasus dengan objek anggaran desa. Pemungutan liar yang dilakukan oleh aparat desa merupakan kasus dengan objek selain APBD. Yang dikorupsi terdiri dari korupsi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, Kas Desa, dan lain-lain. Berbagai macam modus dilakukan oleh pelaku korupsi di pemerintah desa, sebagian besar merupakan praktik penyalahgunaan anggaran sebanyak 51 kasus, 29 kasus penggelapan, 25 kasus laporan fiktif, dan sebanyak 16 kasus pembengkakan anggaran.

Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono tahun 2020 menerima alokasi dana desa sebesar Rp 12,5 miliar, nilai uang yang begitu tinggi dapat memicu potensi terjadinya penyelewengan. Sebagai bukti fenomena penyimpangan fraud di Desa Tanjungsari, Kecamatan Banyudono yaitu kasus penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh Mantan Kepala Desa. Mantan Kepala Desa tersebut melakukan penyelewengan Dana Desa yang diperkirakan sebesar Rp 1,3 miliar, dimana dana desa tersebut adalah anggarannya untuk membeli tanah kas desa pengganti senilai Rp 10,6 miliar (*InewsJateng.id*, 2020).

Beberapa penelitian tentang pencegahan fraud dan potensi fraud dalam pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan bahwa masih sedikit yang melakukan penelitian tersebut, menurut Alfaruqi & Kristianti, (2019) terdapat potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa, dengan indikator pelaku kecurangan menganggap wajar atas kesalahan yang dilakukan dan sering mengulangi hal tersebut. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Ekasari *et al.*, (2021) dalam pencatatan penerimaan kas desa dan pengeluaran kas desa langsung direkap dalam buku kas umum maupun buku pembantu pajak, buku kas bank serta laporan realisasi kegiatan menggunakan aplikasi Siskudes dan tidak melakukan secara manual, maka sulit untuk melakukan penyelewengan dana ataupun kecurangan karena semua terekam pada aplikasi Siskudes.

Berdasarkan penelitian Sumadi & Kansa Putri, (2021) semakin tinggi pengendalian internal akan mempengaruhi pengelolaan laporan keuangan, semakin baik dan taat dengan aturan yang berlaku maka dapat mengurangi terjadinya kecenderungan kecurangan. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian Atmadja & Saputra, (2017) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Sedangkan menurut Cahyadi Putra *et al.*, (2019) ketaatan terhadap aturan akuntansi dalam pelaporan keuangan berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, ini menunjukkan bahwa kecurangan akuntansi dapat diminimalisir melalui ketaatan terhadap aturan akuntansi yang

berlaku.

Berkaitan dengan penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan diangkatnya kembali penelitian ini yaitu variabel bebas (independen) yaitu pengelolaan keuangan, pengendalian internal dan ketaatan aturan akuntansi, dan variabel tetap (dependen) yang menyinggung pada pencegahan kecurangan. Selanjutnya, objek yang dijadikan fokus penelitian juga menunjukkan tempat yang berbeda sehingga yang diperoleh berbeda pula sesuai dengan keadaan di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada desa di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dengan melibatkan seluruh perangkat desa.

Penelitian tentang pencegahan kecurangan (fraud) ini akan disajikan dengan Fraud Triangel Theory. Fraud Triangel Theory menjelaskan mengenai suatu kecurangan hanya akan muncul akibat tiga kondisi, yaitu tekanan, kesempatan dan rasional. Secara simultan ketiga hal tersebut akan mendorong suatu pihak untuk berada pada kondisi moral hazard yang menjustifikasi tindakan kecurangan (Sukirman et al., 2021). Berdasarkan latar belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Keuangan, Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) (Survei Pada Desa di Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah)**”.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan studi kasus pada Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda dengan jumlah sampel sebanyak 75 responden yang melibatkan perangkat desa pada Desa di Kecamatan Banyudono.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Instrumen

Teknik pengujian instrument dilakukan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas agar data yang dihasilkan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

a) Uji Validitas

Uji validitas merupakan alat untuk mengukur ketetapan agar mendapatkann data sesuai dengan yang diinginkan guna penelitian. Berdasarkan penyebaran kuesioner yang dilakukan peneliti kepada 75 responden staf kantor desa di Kecamatan Banyudono, berikut merupakan hasil yang didapatkan:

Tabel 1. Hasil uji Validitas Pengelolaan Keuangan

Butir Pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
1	0,703**	0,000	<i>Valid</i>
2	0,822**	0,000	<i>Valid</i>
3	0,690**	0,000	<i>Valid</i>
4	0,668**	0,000	<i>Valid</i>
5	0,824**	0,000	<i>Valid</i>
6	0,638**	0,000	<i>Valid</i>

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel pengelolaan keuangan memiliki r hitung $> r$ tabel sehingga data pada seluruh butir pada variabel tersebut adalah *valid*. Pengujian menggunakan signifikansi alpha sebesar 0,05 dimana nilai sig. (2-tailed) menghasilkan nilai 0,000 yang artinya di

bawah 0,05 sehingga instrument kuesioner dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pengendalian Internal

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,572**	0,000	Valid
2	0,746**	0,000	Valid
3	0,460**	0,000	Valid
4	0,714**	0,000	Valid
5	0,792**	0,000	Valid
6	0,775**	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel pengendalian internal memiliki r hitung $> r$ tabel sehingga data pada seluruh butir pada variabel tersebut adalah *valid*. Pengujian menggunakan signifikansi α sebesar 0,05 dimana nilai *sig. (2-tailed)* menghasilkan nilai 0,000 yang artinya di bawah 0,05 sehingga instrumen kuesioner dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Ketaatan Aturan Akuntansi

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,623**	0,000	Valid
2	0,687**	0,000	Valid
3	0,399**	0,000	Valid
4	0,414**	0,000	Valid
5	0,749**	0,000	Valid
6	0,815**	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel ketaatan aturan akuntansi memiliki r hitung $> r$ tabel sehingga data pada seluruh butir pada variabel tersebut adalah *valid*. Pengujian menggunakan signifikansi α sebesar 0,05 dimana nilai *sig. (2-tailed)* menghasilkan nilai 0,000 yang artinya di bawah 0,05 sehingga instrumen kuesioner dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Pencegahan Kecurangan

Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
1	0,767**	0,000	Valid
2	0,820**	0,000	Valid
3	0,812**	0,000	Valid
4	0,858**	0,000	Valid
5	0,893**	0,000	Valid
6	0,884**	0,000	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel potensi fraud memiliki r hitung $> r$ tabel sehingga data pada seluruh butir pada variabel tersebut adalah *valid*. Pengujian menggunakan signifikansi α sebesar 0,05 dimana nilai *sig. (2-tailed)* menghasilkan nilai 0,000 yang artinya di bawah 0,05 sehingga instrumen kuesioner dapat digunakan untuk melakukan penelitian.

b) Uji Reliabilitas

Kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban responden terhadap

pertanyaan konsisten dari waktu ke waktu, berikut merupakan hasil uji reliabilitas yang dilakukan kepada staf kantor desa di Kecamatan Banyudono sebanyak 75 responden dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha*:

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Nilai Batas	Keterangan
X1	0,799	0,060	Reliabel
X2	0,736	0,060	Reliabel
X3	0,699	0,060	Reliabel
Y	0,916	0,060	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* instrumen variabel pengelolaan keuangan sebesar 0,799, nilai *cronbach's alpha* instrumen variabel pengendalian internal sebesar 0,736, nilai *cronbach's alpha* instrumen ketaatan aturan akuntansi sebesar 0,699, nilai *cronbach's alpha* instrumen variabel potensi fraud sebesar 0,916. Dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *cronbach's alpha* di atas 0,60, sehingga dapat dikatakan handal dan dapat dipercaya.

B. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan menjelaskan secara umum mengenai data statistik penelitian agar mudah dipahami melalui penyajian data dependen dan independen.

Tabel 6. Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Keuangan	75	18	30	25,99	2,648
Pengendalian Internal	75	14	30	21,76	3,479
Ketaatan Aturan Akuntansi	75	14	30	20,53	3,714
Potensi <i>Fraud</i>	75	18	30	25,92	2,818
Valid N (<i>listwise</i>)	75				

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji analisis statistik deskriptif tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel pengelolaan keuangan (X1) mempunyai skor minimal 18, skor maksimal 30 dengan nilai rata-rata 25,99 yang lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 2,648. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.
2. Variabel pengendalian internal (X2) mempunyai skor minimal 14, skor maksimal 30 dengan nilai rata-rata 21,76 yang lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 3,479. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.
3. Variabel ketaatan aturan akuntansi (X3) mempunyai skor minimal 14, skor maksimal 30 dengan nilai rata-rata 20,53 yang lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 3,714. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.
4. Variabel pencegahan fraud (Y) mempunyai skor minimal 18, skor maksimal 30 dengan nilai rata-rata 25,92 yang lebih besar dari nilai standar deviasi yaitu 2,818. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran data normal dan tidak menyebabkan bias.

C. Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan data primer sehingga pengujian asumsi klasik yang digunakan uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastitas glejser, dan uji normalitas. Untuk dapat melanjutkan tahap uji regresi linear berganda maka harus lolos uji normalitas dengan menggunakan kolmogrov-smirnov. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian telah terdistribusi secara normal atau belum, berikut hasil uji normalitas:

Tabel 7. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Tolerance	VIF
1 (Constant)	6,162	2,439		2,527	0,014		
X1	0,585	0,106	0,550	5,497	0,000	0,705	1,417
X2	0,157	0,092	0,194	1,703	0,093	0,542	1,844
X3	0,055	0,076	0,072	0,723	0,472	0,710	1,409

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa nilai VIF (Variance Inflation Factor) variabel X1, X2, X3 < 10 dan nilai Tolerance Value variabel X1, X2, X3 > 0,1 maka data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 8. Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,706 ^a	0,498	0,477	2,037	1,855

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Uji autokorelasi biasanya digunakan untuk data time series merupakan data yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu, seperti data keuangan atau data lainnya, sementara data *cross section* merupakan data yang diperoleh secara bersamaan atau sekaligus, seperti penyebaran kuesioner. Dari data di atas dapat kita ambil rumus yang tidak terdapat autokorelasi yakni:

$$dU < d < 4-dU = 1,709 < 1,855 < 2,291$$

$$n = 75$$

$$d = 1,855$$

$$dL = 1,543$$

$$dU = 1,709$$

$$4-dL = 4 - 1,543 = 2,457$$

$$4-dU = 4 - 1,709 = 2,291$$

Kesimpulannya adalah tidak terdapat autokorelasi dalam data ini.

Tabel 9. Uji Heteroskedastisitas Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3,854	1,581			2,438	0,017
X1	-0,019	0,069	-0,039		-0,280	0,780
X2	-0,064	0,060	-0,167		-1,064	0,291
X3	-0,024	0,049	-0,066		-0,482	0,631

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas glejser dapat disimpulkan bahwa nilai variabel X1, X2 dan X3 nilai Sig. > 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas istilah lain terjadi gejala homokedastisitas karena regresi yang baik terjadi homokedastisitas bukan heteroskedastisitas.

Tabel 10. Uji normalitas One-sample kolmogrov-smirnof test

		<i>Unstandardized Residual</i>
<i>N</i>		75
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	1,99547992
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,077
	<i>Positive</i>	0,77
	<i>Negative</i>	-0,077
<i>Test Statistic</i>		0,077
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,200 ^{c,d}

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan kolmogrov-smirnov test pada setiap variabel menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,200 dan diatas nilai 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data terdistribusi normal.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan ketika ingin menganalisis pengaruh maupun memprediksi beberapa variabel bebas (independent variable) dengan satu variabel (dependent variable). Variabel terkait pada regresi linear berganda dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara variabel terkait (Y) dengan variabel bebas (X1, X2, Xn). Pengaruh tersebut dapat dilihat dari besaran b (koefisien regresi), jika koefisien regresi/b = 0 maka tidak ada pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terkait, jika koefisien variabel $\neq 0$ maka ada pengaruh pada variabel bebas terhadap variabel terkait.

Persamaan regresi:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y : Variabel dependen pencegahan kecurangan (*fraud*)

a : Konstanta

b₁, b₂, b₃ : Koefisien regresi

X₁ : Variabel independen pengelolaan keuangan

X₂ : Variabel independen pengendalian internal

X₃ : Variabel independen ketaatan aturan akuntansi

e : *Random error*

Berikut hasil pengolahan regresi linear berganda:

TABEL 11. Analisis Regresi Linear Berganda

		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
Model		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	6,162	2,439		2,527	0,014
	X1	0,585	0,106	0,550	5,497	0,000
	X2	0,157	0,092	0,194	1,703	0,093
	X3	0,055	0,076	0,072	0,723	0,472

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Hasil tabel di atas diperoleh persamaan regresi:

$$Y = 6,162 + 0,585 X_1 + 0,157 X_2 + 0,055 X_3 + e$$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas sebagai berikut:

- Konstanta (α) = 6,162 menunjukkan nilai konstanta, jika nilai variabel X = 0 maka tingkat pencegahan kecurangan sebesar 6,162.
- Koefisien X1 β 1 = 0,585 menyatakan bahwa jika variabel pengelolaan keuangan (X1)

ditingkatkan satu satuan dan variabel X2 dan X3 nilainya tetap, maka tingkat pencegahan kecurangan akan turun sebesar 0,585 satuan. Sebaliknya, jika variabel pengelolaan keuangan (X1) diturunkan satu satuan dan variabel X2 dan X3 nilainya tetap, maka pencegahan kecurangan akan naik sebesar 0,585 satuan.

- c. Koefisien $X_2\beta_2 = 0,157$ menyatakan bahwa jika variabel pengendalian internal (X2) ditingkatkan satu satuan dan variabel X1 dan X3 nilainya tetap, maka tingkat pencegahan kecurangan akan turun sebesar 0,157 satuan. Sebaliknya, jika variabel pengendalian internal (X2) diturunkan satu satuan dan variabel X1 dan X3 nilainya tetap, maka pencegahan kecurangan akan naik sebesar 0,157 satuan.
- d. Koefisien $X_3\beta_3 = 0,055$ menyatakan bahwa jika variabel ketaatan aturan akuntansi (X3) ditingkatkan satu satuan dan variabel X1 dan X2 nilainya tetap, maka tingkat pencegahan kecurangan akan turun sebesar 0,055 satuan. Sebaliknya, jika variabel ketaatan aturan akuntansi (X3) diturunkan satu satuan dan variabel X1 dan X2 nilainya tetap, maka pencegahan kecurangan akan naik sebesar 0,055 satuan.

E. Uji Hipotesis

1. Uji Ketetapan Model (F-Test)

Uji F digunakan untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel bebas X secara bersama-sama (secara simultan) terhadap Y. hasil uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA berikut:

Tabel 12. Uji F-Test

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	292,856	3	97,619	23,522	0,000 ^b
	Residual	294,664	71	4,150		
	Total	587,520	74			

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Hasil perhitungan tabel ANOVA menunjukkan bahwa model regresi ini memiliki nilai F hitung sebesar 23,522 dengan nilai Sig. sebesar $0,000 < 0,05$. Maka model regresi ini tepat dalam memprediksi pengaruh X terhadap Y.

a) Uji Secara Parsial (Uji t-Test)

Uji t digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel X terhadap Y pada survei Desa di Kecamatan Banyudono secara parsial. Ditentukan nilai α (level of signifikansi) = 0,05. Berikut adalah hasil olah data uji t pada penelitian ini:

Tabel 13. Uji t-Test

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6,162	2,439		2,527	0,014
	X1	0,585	0,106	0,550	5,497	0,000
	X2	0,157	0,092	0,194	1,703	0,093
	X3	0,055	0,076	0,072	0,723	0,472

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh hasil uji t sebagai berikut:

- a. Tingkat signifikansi pada variabel pengelolaan keuangan (X1) adalah $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak sehingga keadaan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).
- b. Tingkat signifikansi pada variabel pengendalian internal (X2) adalah $0,093 > 0,05$ maka H_0 diterima sehingga keadaan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

- c. Tingkat signifikansi pada variabel ketaatan aturan akuntansi (X3) adalah $0,472 > 0,05$ maka H_0 diterima sehingga keadaan tersebut dapat dinyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang diberikan nilai variabel dependen terhadap variabel independen untuk menunjukkan kesesuaian garis regresi terhadap data. Berikut presentase data pada tabel Model Summary:

Tabel 14. Uji koefisien determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,706 ^a	0,498	0,477	20,037

Sumber: Data Primer yang diolah Tahun 2024

Hasil menunjukkan nilai koefisien determinasi (*adjusted R²*) sebesar 0,498 artinya besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 49,8%. Sisanya ($100\% - 49,8\%$) = 50,2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disertakan dalam penelitian.

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan keuangan (X1), pengendalian internal (X2) dan ketaatan aturan akuntansi (X3) terhadap pencegahan kecurangan (Y) pada Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, uraiannya sebagai berikut:

1. Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*), hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama (H_1) dengan nilai koefisien sebesar 0,585, nilai t hitung pengelolaan keuangan sebesar 5,497, dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, laporan keuangan pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa). Keuangan desa dikelola berdasarkan transparan, akuntabel, partisipasi serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa diawasi dan dibina agar memiliki kemampuan sumber daya manusia yang kompeten dan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang sejalan dengan tingkat kepentingan khususnya masyarakat desa itu sendiri, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian Alfaruqi & Kristianti (2019) dan Kusuma & Hendri (2021) sejalan dengan yang dilakukan peneliti yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dibuktikan pada hasil uji nilai signifikan sebesar 0,000 atau $< 0,05$ (standar yang digunakan oleh peneliti), dengan melihat indikator-indikator angket yang telah peneliti bagikan pada perangkat desa tidak serta merta diisi dengan jujur, maka dari itu pengendalian diperlukan untuk mencegah terjadinya potensi kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*), hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua (H_2) dengan nilai koefisien sebesar 0,157, nilai t hitung pengendalian internal sebesar 1,703, dan

nilai signifikan sebesar $0,93 > 0,05$.

Pengendalian internal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006) menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi. Apabila pelaksanaan sistem pengendalian internal instansi dapat berjalan dengan baik dan berkualitas, maka keandalan laporan keuangan dapat terlindungi sehingga dapat mengurangi terjadinya penyalahgunaan dan terhindar dari potensi kecurangan (*fraud*).

Hasil penelitian Eka Sari et al. (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap potensi kecurangan (*fraud*), sedangkan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wardani & Nasution (2024) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan (*fraud*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi dan baik dalam menyajikan laporan keuangan desa maka dapat mencegah potensi kecurangan (*fraud*).

3. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Pencegahan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil analisis uji parsial menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh pada pencegahan kecurangan (*fraud*), hasil penelitian ini mendukung hipotesis ketiga (H3) dengan nilai koefisien sebesar 0,055, nilai *t* hitung ketaatan aturan akuntansi sebesar 0,723, dan nilai signifikan sebesar $0,472 > 0,05$.

Aturan akuntansi disebut sebagai dasar penyusunan laporan keuangan, ketaatan aturan akuntansi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2007) diharapkan setiap Pemerintah Daerah dapat mengelola keuangannya secara ekonomis, efektif, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang telah diterima secara umum. Sedangkan ketaatan aturan akuntansi dipandang sebagai tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur akuntansi, penyajian laporan keuangan beserta semua bukti pendukungnya, dan prosedur pengelolaan aset organisasi, dengan aturan yang telah ditentukan dalam Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam standar akuntansi terdapat aturan-aturan yang harus digunakan dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berpedoman terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bahwa: Ketaatan Aturan Akuntansi merupakan suatu kewajiban dalam organisasi untuk mematuhi segala ketentuan atau aturan akuntansi dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan agar tercipta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan efektif, andal serta akurat informasinya.

Hasil penelitian Marta SD & Yudawati (2022) menunjukkan bahwa ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Sedangkan penelitian ini selaras dengan penelitian Firdausy & Sari (2022) yang menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*), Artinya bahwa ada atau tidaknya ketaatan aturan akuntansi mempengaruhi pencegahan kecurangan (*fraud*), pada pengelolaan keuangan Desa di Kecamatan Banyudono pembuatan laporan keuangan bisa dikatakan belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan pengguna laporan keuangan sebagai skala prioritasnya, tetapi masih terdapat kepentingan golongan dalam kaitannya pembuatan laporan keuangan. Selain itu, penanggungjawab terkadang mengungkapkan laporan keuangan yang kurang memadai dan ada yang ditutup-tutupi. Hal tersebut yang menyebabkan ketaatan aturan akuntansi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dengan menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2006), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2014), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2007). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.
2. Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.
3. Ketaatan aturan akuntansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pada Desa di Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.

Saran

1. Bagi pemerintah desa diharapkan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi.
2. Bagi aparatur desa perlu diberikan pelatihan teknis secara berkala mengenai: sistem pengendalian internal, SAP, etika kerja dan anti korupsi. Kepatuhan terhadap aturan akuntansi harus ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk formalitas, tetapi dalam pemahaman substansi dan penerapan nyata di lapangan.
3. Bagi pemerintah daerah/aparatur melakukan pengawasan dan audit internal secara rutin, tidak hanya bersifat administrative, tetapi juga mendalam secara substantif.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain (seperti integritas personal, budaya organisasi, sistem hukuman, atau pengawasan eksternal). Menggunakan metode campuran (*mix method*) untuk menggali lebih dalam tentang praktik-praktik pencegahan kecurangan yang tidak terukur secara kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hall, J., & Singleton, T. (2005). *Information Technology Auditing and Assurance* (2nd ed.). Thomson.
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019a). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210. <https://doi.org/10.28932/jam.v11i2.1915>
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019b). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 199–210.
- Atmadja, A. T., & Saputra, K. A. kurniawan. (2017). Pencegahan Fraud dalam pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12 No.1.
- Cahyadi Putra, I. G., Saitri, P. W., & Ngurah Gunadi, I. G. B. (2019). Accounting Fraud Tendency on Village Credit Institution. *International Journal of Accounting & Finance in Asia Pasific (IJAFAP)*, 2 no. 2.
- Eka Sari, M., Indra Arza, F., & Taqwa, S. (2019). PENGARUH AKUNTABILITAS, KESESUAIAN KOMPENSASI DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI KECURANGAN DANA DESA. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1443–1457.
- Ekasari, L. D., Mukoffi, A., Tato, F., & Nifanngeljau, J. (2021). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Desa Guna Mencegah Kecurangan Akuntansi (Accounting Fraud). *Jurnal*

- Akuntansi Trisakti*, 8 No. 1. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25105/jat.v8il.8156>
- Firdausy, R. C., & Sari, R. P. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Pengendalian Internal, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(2), 541–546.
- Gujarati, D. N. (2006). *Dasar-Dasar Ekonomika Jilid I* (3rd ed.). Erlangga.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Basic Econometrics)* (4th ed.). Salemba Empat.
- Hehanussa. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Conference in Business, Accounting, and Management*, 2.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS edisi 5*. Universitas Diponegoro.
- INewsJateng.id. (2020). *Mantan Kades di Boyolali Jadi Tersangka Korupsi Dana Desa Rp1,3 Miliar*. INewsJateng.Id. <https://jateng.inews.id/berita/mantan-kades-di-boyolali-jadi-tersangka-korupsi-dana-desa-rp13-miliar#:~:text=BOYOLALI%2CiNews.id%20-%20Kejaksaan%20Negeri%20Kejari%29%20Boyolali%20menetapkan,Desa%20Kades%29%20Tanjungsari%20Kecamatan%20Banyudono%20Boyolali%20Jawa%20T>
- IWC. (2019). Outlook Dana Desa 2019 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa di Tahun Politik. *Indonesian Corruption Watch, Retived from Antikorupsi*.
- Karianga, H. (2017). *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Prenada Media.
- Kelly, P., & A. Hartley, C. (2010). Casino Gambling and Workplace Fraud: A Countionary Tale for Managers. *Management Research Review*, 33(3), 224–239. <https://doi.org/10.1108/01409171011030381>
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* (Wibi Hardani (ed.); 1st ed.). Erlangga.
- Kusuma, W. J., & Hendri, N. (2021). ANALISIS POTENSI KECURANGAN (FRAUD) PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA RUKTI SEDYO KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 2(1), 122–127.
- M. Lister, L. (2007). A Practicial Approach to Fraud Risk: Comprehensive Risk Assessments Can Enable Auditors to Focus Antifraud efforts on Areas Where Their Organization is Most Vulnerable. *Institute of Internal Auditors, Inc*, 64(6), 61–66.
- Maisti Wardani, R., & Nasution, M. I. (2024). PENGARUH KOMPETENSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN MORALITAS APARATUR TERHADAP POTENSI TERJADINYA KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(2), 236–246.
- Marshall B, R., & Paul John, S. (2015). *Accounting Information System* (14th ed.). Library of Congress. [https://doi.org/file:///C:/Users/User/Documents/Proposal/Romney,%20M.%20B.,%20&%20Steinbart,%20P.%20J%20\(2015\)%20Accounting%20Information%20System.pdf](https://doi.org/file:///C:/Users/User/Documents/Proposal/Romney,%20M.%20B.,%20&%20Steinbart,%20P.%20J%20(2015)%20Accounting%20Information%20System.pdf)
- Marta S D, T., & Yudawati, Y. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada SKPD Kabupaten Majalengka). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(1), 31–40.
- Novikasari, Y., & et al. (2017). Pengaruh Moralitas Individu, Sistem pengendalian Intern

- Pemerintah, dan Ketaatan Aturan Akuntansi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada SKPD Kab. Kuantan Singingi). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 4(1), 1516–1530.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 13 (2006).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pub. L. No. 59 (2007).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 113 (2014).
- Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pub. L. No. 20 (2018).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pub. L. No. 60 (2008).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Pub. L. No. 71 (2010).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pub. L. No. 43 (2014).
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pub. L. No. 60 (2014).
- Pramana, S., Yordani, R., Kurniawan, R., & Yuniarto, B. (2016). *Dasar-Dasar Statistika Dengan Software R: Konsep dan Aplikasi* (2nd ed.). Bogor : In Media, 2017.
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate dengan SPSS* (Cet. 1). Gava Media.
- Ratmono, D. (2017). Dapatkah Teori Fraud Triangel Menjelaskan Kecurangan dalam Laporan Keuangan? *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14 (2), 100–117.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D. CV. *Alfabeta: Bandung*.
- Sukirman, Purnomo Sari, M., Rachmadani, W. S., & Wijaya, R. E. (2021). The Role of Auditor Switching on Going Concern Audit Opinion Acceptance. *ICE-BEES*.
- Sumadi, N. K., & Kansa Putri, N. M. D. (2021). Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada LPD di Kecamatan Mengwi. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*.
- Syahrul Mustofa. (2020). Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Merauke. *Guepedia*, 3(1), 50–73.
- T. Wells, J. (2017). *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection* (5th ed.). John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. <https://books.google.co.id/books?id=gLZpDgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Tarigan, & et al. (2016). Pengaruh Moralitas Individu, Asimetri Informasi, Efektifitas Pengendalian Internal dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Pada BUMD Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 896–909.
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17 (2003).